

List of Tax & Customs Regulation December Period 1

No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Tentang
1	PMK Nomor 97 Tahun 2024	4-Dec-24	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
2	PMK Nomor 96 Tahun 2024	4-Dec-24	Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
3	PMK Nomor 93 Tahun 2024	2-Dec-24	Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional
4	PER-15/BC/2024	20-Nov-24	Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2025
5	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024	8-Nov-24	Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi
6	PMK Nomor 85 Tahun 2024	25-Oct-24	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
7	50/KM.4/2024	25-Oct-24	Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor
8	49/KM.4/2024	24-Oct-24	Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor
9	PER-10/BC/2024	24-Oct-24	Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
10	KEP-198/BC/2024	16-Oct-24	Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Ceisa 4.0 Tahap Keempatbelas
11	KEP-196/BC/2024	15-Oct-24	Pelaksanaan Piloting Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 Dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 Pada Tahun 2024 Tahap Iii
12	PMK Nomor 82 Tahun 2024	14-Oct-24	Tata Cara Pembebasan Cukai
13	PMK Nomor 81 Tahun 2024	14-Oct-24	Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
14	PMK Nomor 80 Tahun 2024	14-Oct-24	Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
15	PMK Nomor 79 Tahun 2024	14-Oct-24	Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi
16	PMK Nomor 78 Tahun 2024	11-Oct-24	Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai
17	PMK Nomor 74 Tahun 2024	10-Oct-24	Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

18	46/KM.4/2024	9-Oct-24	Daftar Barang yang Dilarang Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor
19	PMK Nomor 71 Tahun 2024	9-Oct-24	Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok
20	PMK Nomor 70 Tahun 2024	9-Oct-24	Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok
21	PENG-31/PJ.09/2024	9-Oct-24	Waspada penipuan mengatasnamakan direktorat jenderal pajak
22	PMK Nomor 69 Tahun 2024	8-Oct-24	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
23	PER-9/BC/2024	8-Oct-24	Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai
24	15/KM.10/2024	27-Sep-24	Tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 oktober 2024 sampai dengan 31 oktober 2024
25	PER-8/PJ/2024	24-Sep-24	Tata cara pemberian dan penggunaan nomor pokok wajib pajak untuk kepentingan administrasi perpajakan bagi perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan
26	PENG-27/PJ.09/2024	24-Sep-24	Peluncuran simulator coretax
27	KEP-179/BC/2024	20-Sep-24	Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Ketiga Belas
28	PMK Nomor 66 Tahun 2024	19-Sep-24	Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan
29	KEP-173/BC/2024	18-Sep-24	Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN
30	KEP-167/BC/2024	12-Sep-24	Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi Sistem Validasi Pemenuhan Ketentuan Larangan dan Pembatasan pada Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
31	PMK Nomor 61 Tahun 2024	11-Sep-24	Insentif tambahan PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yg ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2024

32	PENG-26/PJ.09/2024	9-Sep-24	Petunjuk Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Bagi Wajib Pajak Serta Penyesuaian Atas Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan Masyarakat Nomor Peng-4/PJ.09/2024
33	42/KM.4/2024	30 Agustus 2024	Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
34	KEP-152/BC/2024	30 Agustus 2024	Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Ceisa 4.0 Tahap Kedua Belas
35	PMK 59 Tahun 2024	23 Agustus 2024	Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya
36	PMK 58 Tahun 2024	23 Agustus 2024	Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
37	PP Nomor 29 Tahun 2024	12 Agustus 2024	Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota Nusantara
38	PMK 50 Tahun 2024	31 Juli 2024	Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean
39	28/KM.4/2024	31 Juli 2024	Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
40	12/KM.10/2024	30 Juli 2024	Tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024
41	PMK 49 Tahun 2024	23 Juli 2024	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya
42	PMK 48 Tahun 2024	23 Juli 2024	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
43	SE-9/PJ/2024	23 Juli 2024	Pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah hong kong wilayah administratif khusus republik rakyat china beserta protokolnya
44	SE-8/PJ/2024	23 Juli 2024	Pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik afrika selatan
45	SE-6/PJ/2024	23 Juli 2024	Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Beserta Protokolnya

46	SE-5/PJ/2024	23 Juli 2024	Pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara Meksiko Serikat dan protokolnya
47	PENG-23/PJ/2024	19 Juli 2024	pembaruan kedua daftar layanan perpajakan berbasis npwp 16 digit, nitku, dan npwp 15 digit
48	PMK 47 Tahun 2024	18 Juli 2024	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
49	KEP-124/BC/2024	18 Juli 2024	Pelaksanaan Piloting Modul Vehicle Declaration (Vhd) Pada Tahun 2024
50	PENG-22/PJ.09/2024	14 Juli 2024	Pemberitahuan phising M-Pajak
51	ND-14/PJ/PJ.02/2024	8 Juli 2024	Penegasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
52	PER-7/PJ/2024	5 Juli 2024	Perubahan atas PER-4/PJ/2018 ttg tata cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis
53	26/KM.4/2024	1 Juli 2024	Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
54	KEP-113/BC/2024	1 Juli 2024	Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi Single Submission Pabean-Karantina pada Tempat Penimbunan Berikat
55	10/KM10/2024	28 Juni 2024	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2024 Sampai Dengan 31 Juli 2024
56	PER-6/PJ/2024	28 Juni 2024	Penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP dgn format 16 (enam belas) digit, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi perpajakan
57	KEP-105/BC/2024	22 Juni 2024	Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Ceisa 4.0 Tahap Kesebelas
58	PMK 43 TAHUN 2024	21 Juni 2024	Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
59	Perpres nomor 63 Tahun 2024	13 Juni 2024	Perubahan atas Perpres nomor 77 tahun 2019 ttg pengesahan multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting (konvensi multilateral utk menerapkan tindakan-tindakan terkait dgn P3B utk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba